

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA
(Studi Kasus Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

OLEH:

**LIDIA SARI RAHAYU
NPM: 14.851.0005**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)31/8/23

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA
(Studi Kasus Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area**



OLEH:

**LIDIA SARI RAHAYU
NPM: 14.851.0005**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

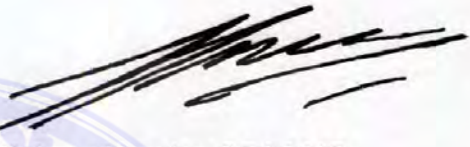
2018

LEMBARAN PENGESAHAN


Judul skripsi : Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Dalam Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah)
Nama : Lidia Sari Rahayu
NPM : 148510005
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Isipol

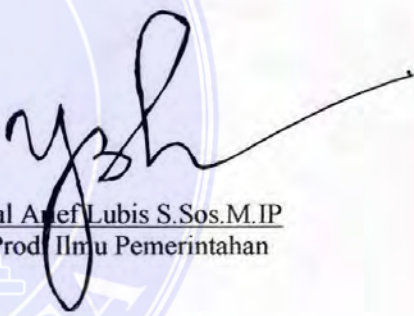
Disetujui oleh
Komisi pembimbing


Prof. Dr. M. Arif Nasution MA,
Pembimbing 1


Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd, MAP
Pembimbing 2

mengetahui


Prof. Dr. M. Arif Nasution MA,
Dekan Fisip UMA


Yurial Arief Lubis S.Sos.M.IP
ka. Prod. Ilmu Pemerintahan

Tanggal lulus:

LEMBARAN PERNYATAAN

Bahwa skripsi yang saya susun ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) ilmu pemerintahan di fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas medan Area.adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Desember 2018



Lidia Sari Rahayu
148510005

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

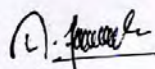
TUGAS AKHIR/SKRPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIKS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Lidia sarirahayu
NPM : 14.851.0005
Program study : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : ISIPOL
Jenis karya : SKRIPSI

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, peyutujuan penyetujuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak bebas royalti *Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-free Right)*** atas karya ilmiah saya yang berjudul Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Dalam Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah). Berdasarkan perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalimedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (databases) merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skrpsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan :



LIDIA SARI RAHAYU

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di bintang 15 Desember 1995, penulis merupakan anak pertama dari 4 (empat) bersaudara. Tahun 2015 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Takengon dan tahun 2015 terdaftar sebagai mahasiswa fakultas isipol Universitas Medan Area. Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) Lubu pakam dinas kependudukan.



ABSTRAK

Kabupaten Aceh Tengah berjuluk Negeri di atas awan, julukan daerah yang begitu sejuk dan indah dengan daerah wisatanya baik Danau Lut Tawar, Dermaga Wisata Lukup Penalam, Bur Gayo dan Bur Lancuk Leweng lain sebagainya Beragam suku dan budaya yang ada di Provinsi Aceh diantaranya suka Gayo yang berada di kabupaten Aceh Tengah, masyarakat etnis Gayo memiliki kebudayaan, seni, tradisi dan kegiatan sosial budaya lainnya yang seharusnya dapat dijadikan sebagai destinasi wisata budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintahan Aceh Tengah dalam pengembangan Objek Wisata, menganalisis kendala-kendala dalam di hadapi Pemerintah daerah, menganalisis strategi pengembangan wisata budaya di Kota Takengon. Metode penelitan ini menggunakan metode kualitatif. Hasil model pengelolaan pariwisata di Kota Takengon masyarakat dan pemerintah kendala termasuk kurangnya infrastruktur, sumber daya manusia, dan fasilitas pariwisata. Melalui analisis ini dipilih strategi terutama pentingnya pemerintah untuk memainkan perannya terutama dalam regulasi dan kebijakan dalam penyediaan infrastruktur dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan sadar wisata. dan yang menjadi kendala untuk pengembangan pariwisata, kurangnya sarana prasarana, tidak adanya bus pariwisata dan terkendala dengan anggaran. Adapun strategi pengembangan pariwisata tersebut belum maksimal.

Kata kunci : peran, pemerintahan, objek wisata

ABSTRACT

Central Aceh Regency is nicknamed the Country above the clouds, the nickname of the area that is so cool and beautiful with its tourist areas, including Lake Lut Tawar, Lukup Penalam Tourism Pier, Bur Gayo and Bur Lancuk Leweng, etc. The various ethnic groups and cultures in Aceh Province include the Gayo who Located in Central Aceh district, the Gayo ethnic community has culture, art, traditions and other socio-cultural activities that should be used as cultural tourism destinations. This study aims to determine the role of the Central Aceh Government in the development of tourism objects, to analyze the obstacles faced by the local government, to analyze the strategy of developing cultural tourism in the city of Takengon. This research method uses qualitative methods. The results of the tourism management model in the City of Takengon community and government constraints include the lack of infrastructure, human resources, and tourism facilities. Through this analysis, strategies were chosen, especially the importance of the government to play its role, especially in regulations and policies in providing infrastructure and encouraging people to increase tourism awareness. and the obstacles to tourism development, the lack of infrastructure, the absence of tourism buses and constrained by the budget. The tourism development strategy has not been maximized.

Keywords: role, government, tourist attraction

KATA PENGANTAR

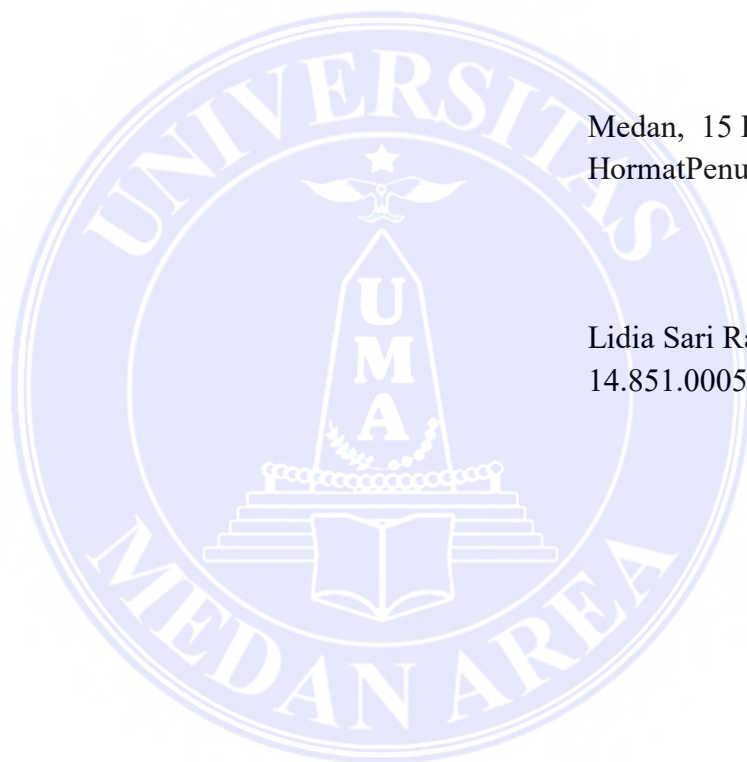
Puji beserta Syukur penulis ucapkan khadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karuni-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik, Adapun judul Skripsi penulis yaitu:

“Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Dalam Pengembangan Objek Wisata (Study Kasus Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah)” merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi strata 1 (satu), di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih dan rasa hormat serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta yang selalu memberikan semangat, membiayai dan memberikan doa yang tidak pernah henti untuk keberhasilan dan kebahagiaan penulis saat ini maupun masa yang akan datang.
2. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dan sekaligus Dosen Pembimbing I (satu) Penulis.
3. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd, MAP selaku Dosen Pembimbing II penulis.
4. Bapak Bimby Hidayat, S.Sos, MA selaku Sekretaris dalam penyusunan Skripsi Penulis.
5. Seluruh teman-teman Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini
6. Rekan-rekan se-almamater.

7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan Ilmu dan Informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran, maupun kritikan serta motivasi yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi sehingga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca



Medan, 15 Desember 2017
HormatPenulis,

Lidia Sari Rahayu
14.851.0005

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Pengertian Peran	6
2.1.2 Pengertian Pariwisata.....	12
2.1.3 Pengertian Pemerintahan	17
2.1.4 Objek Wisata.....	20
2.1.5 Objek Wisata Andalan Kabupaten Aceh Tengah	23
2.2 Kerangka Berpikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian	26
3.1.1 Jenis Penelitian.....	26
3.1.2 Sifat Penelitian	27
3.1.3 Lokasi Penelitian.....	27
3.1.4 Waktu Penelitian	28
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN	31
4.1 Gambaran Umum	31
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Tengah.....	31
4.1.2 Sejarah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	32
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	32
4.1.4 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pariwisata.....	36
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	51
4.2.1 Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.....	51
4.2.2 Pendapatan Asli Daerah.....	52
4.2.3 Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata.....	54
4.2.4 Objek Wisata yang menjadi Andalan di Kabupaten Aceh Tengah.....	59
4.2.5 Kendala Yang di Hadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam pengembangan Objek Wisata	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68

5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran	25
Bagan 3.1 Struktur Organisasi	35



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal dan Waktu Penelitian	28
Tabel 4.1 Kelompok Sadar Wisata.....	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Ujung Paking.....	59
Gambar 4.2 Danau Laut Tawar.....	60
Gambar 4.3 Pantan Terong	60
Gambar 4.4 Dermaga Wisata Lukup Penalam.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepariwisata akhir-akhir ini menjadi pokok pembicaraan yang hangat di kalangan media massa, diskusi atau seminar terutama perkembangan pariwisata di daerah-daerah yang memiliki aset wisata yang beraneka ragam, terutama wisata alam budaya yang indah, bukit-bukit dengan fenomena yang permai, adat istiadat beraneka ragam, serta flora dan fauna yang khas dan langka inilah yang menyebabkan pola perjalanan wisata dirancang sampai ke daerah atau kecamatan yang terkecil. Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, sudah tentu daerah memerlukan biaya yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 157 UU No.32 Tahun 2004 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004)

Sebagai industri perdagangan jasa, kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu : perencanaan (planning) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (development) fasilitas

utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (policy) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (regulation).

Pariwisata merupakan industri yang memiliki kriteria-kriteria khusus, mengakibatkan dampak positif dan negatif. Untuk memenuhi kriteria khusus tersebut, memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata diperlukan perencanaan pariwisata yang matang. Masing-masing daerah tujuan wisata memiliki permasalahan yang berbeda dan memerlukan jalan keluar yang berbeda pula. Dalam pariwisata, perencanaan bertujuan untuk mencapai cita-cita atau tujuan pengembangan pariwisata. Secara garis besar perencanaan pariwisata mencakup beberapa hal penting yaitu:

1. perencanaan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan berbagai jenis industri yang berkaitan dengan pariwisata
2. perencanaan penggunaan lahan
3. perencanaan infrastruktur yang berhubungan dengan jalan, bandar udara, dan keperluan lainnya seperti : listrik, air, pembuangan sampah dan lain-lain
4. perencanaan pelayanan sosial yang berhubungan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, dan
5. perencanaan keamanan yang mencakup keamanan internal untuk daerah tujuan wisata dan para wisatawan

Pembangunan pariwisata umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama pembangunan fasilitas dan jasa pariwisata. Namun, pengadaan infrastruktur

umum seperti jalan, listrik dan air yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata terutama untuk proyek-proyek yang berskala besar yang memerlukan dana yang sangat besar seperti pembangunan bandar udara, jalan untuk transportasi darat, proyek penyediaan air bersih, dan proyek pembuangan limbah merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin dan pengawas para investor yang menanamkan modalnya dalam bidang pembangunan pariwisata.

Peraturan pemerintah memiliki peran yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Peraturan-peraturan penting yang harus dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan tersebut adalah:

1. peraturan perlindungan wisatawan terutama bagi biro perjalanan wisata yang mengharuskan wisatawan untuk membayar uang muka (deposit payment) sebagai jaminan pemesanan jasa seperti akomodasi, tour dan lain-lain.
2. peraturan keamanan kebakaran yang mencakup pengaturan mengenai jumlah minimal lampu yang ada di masing-masing lantai hotel dan alat-alat pendukung keselamatan lainnya
3. peraturan keamanan makan dan kesehatan yang mengatur mengenai standar kesehatan makanan yang disuguhkan kepada wisatawan
4. peraturan standar kompetensi pekerja-pekerja yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus seperti seperti pilot, sopir, dan nahkoda.

Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam seperti flora dan fauna yang langka, air, tanah dan udara agar tidak terjadi pencemaran yang dapat mengganggu bahkan merusak suatu ekosistem.

Oleh karena itu, penerapan semua peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk mengembangkan sektor ini pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor ini. salah satu kebijakan tersebut adalah menggali dan mengembangkan objek-objek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai penghasil devisa, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkokoh persatuan, dan kesatuan, serta mengenal budaya bangsa. Pembangunan kepariwisataan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta antara berbagai usaha kepariwisataan yang kecil, menengah dan besar agar saling menunjang.

Di tahun ini Kemunculan sejumlah objek wisata baru di kabupaten Aceh Tengah semakin banyak dan meluas, apalagi dengan keindahan alam dan kesejukan udaranya yang semakin mendukung minat Wisatawan untuk berkunjung ke Tempat ini, salah satu objek wisata andalan Kabupaten Aceh Tengah yang sedang dalam perkembangan adalah Pantan Terong, dari sini kita bisa melihat danau Laut Tawar dengan jelas yang begitu menawan, Bur Gayo, Dermaga Lukup Penalam, Bur Telege, dan Bur Lancuk Leweng. pembuatan jalan baru di pinggiran danau yang sekarang masih dalam proses pengerjaan. Pembuatan Objek Wisata baru ini sebenarnya harus di imbangi dengan Fasilitas umum yang lengkap, sehingga wisatawan pun nyaman dalam menikmati keindahan alam di dataran tinggi Tanah Gayo, tetapi nyatanya masih banyak tempat wisata di Kab Aceh Tengah belum memiliki fasilitas umum yang lengkap.

Masih banyaknya fasilitas yg belum ada contohnya saja Wc, Mushola, dan tempat parkir yang tidak tersedia. Dalam hal ini Pemerintah Daerah mengaku memiliki banyak kendala dalam mengembangkan lokasi wisata di daerah tertentu, salah satunya klaim kepemilikan lahan dari sejumlah masyarakat dan lain sebagainya, tujuan dapat terlaksana jika sektor pariwisata dikembangkan dengan lebih serius dan profesional untuk meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah, juga sebagai ajang promosi memperkenalkan sejarah budaya daerah kepada masyarakat luar. Pengembangan kepariwisataan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaannya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah dalam Pengembangan Objek Wisata guna menunjang Pendapatan Asli Daerah.” (Studi Kasus Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah)

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam pengembangan objek wisata
2. Apa saja faktor-faktor Penghambat Pemeritah Kabupaten Aceh Tengah dalam Mengembangkan Objek wisata

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam sektor pariwisata
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam pengembangan objek wisata

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut.

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk meningkatkan pengembangan sektor pariwisata.
 - b. Diharapkan dapat memperkaya kajian kepariwisataan
2. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan salah satu informasi tentang pengembangan objek wisata
 - b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai media untuk pendalaman ilmu pengetahuan mengenai pengembanag objek wisata
 - c. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pemerintah dalam pengembangan objek wisata
 - d. Untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar strata 1 (S1) pada fakultas ilmu sosial dan politik khususnya ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Peran

Menurut Rivai (dalam Sitorus, 2006:133) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jika dikaitkan dengan peranan sebuah instansi maka dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh instansi/kantor sesuai dengan posisi kantor tersebut.

Menurut Kozier (dalam Sitorus, 2006:134) Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Makna Peran menurut Suhardono (dalam Sitorus, 2006:136) adalah perilaku yang diharapkan seseorang agar dapat mempengaruhi suatu keadaan tertentu berdasarkan status dan fungsi yang dimilikinya dan seseorang dikatakan menjalankan peran apabila telah menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari status yang disandangnya. Secara etimologis menurut Kamus Bahasa Indonesia Peran dapat diartikan sebagai tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu

Menurut Anton Moelyono (1949) Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat seperti himpunan, gerombolan atau organisasi, maka peranan berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat”. Peranan (role) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang. Peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Peran menurut Soejono Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Sedangkan menurut Dougherty & Pritchard (dalam Bauer 2003:56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau role perception (Kahn Oswald, Mossholder, & Harris dalam Bauer, 2003:58).

Levinson (dalam Soekanto 2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. Parwoto dalam (Soehendy, 1997:28) mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri :

1. Keterlibatan dalam keputusan : mengambil dan menjalankan keputusan.
2. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
3. Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran).
4. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
5. Peran masyarakat : sebagai subyek.

Struktur Peran dibagi menjadi dua yaitu :

1. Peran Formal (Peran yang Nampak jelas) yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.
2. Peran Informal (Peran tertutup) yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

Pada akhir tahun 1960-an, Henry Mintzberg, seorang lulusan MIT, melakukan penelitian seksama terhadap lima orang eksekutif untuk menentukan tugas mereka. Berdasarkan observasinya, Mintzberg menyimpulkan bahwa

manajer melakukan sepuluh peran atau rangkaian perilaku yang berbeda dan saling berkaitan erat. Seperti yang diperlihatkan dalam yg di bawah ini, kesepuluh peran ini bisa dikelompokkan sebagai antarpersonal, interpersonal, dan pengambilan keputusan.

1. Peran Antarpersonal

Semua manajer diharuskan melakukan tugas-tugas terkait seremonial dan bersifat simbolis. Sebagai contoh, ketika rector perguruan tinggi memberikan ijazah sarjana pada acara wisuda atau seorang pengawas pabrik menjadi pemandu tur pabrik untuk sekelompok murid sekolah menengah, ia berperan sebagai tokoh utama (figurehead). Semua manajer memiliki peran kepemimpinan. Peran ini mencakup perekrutan, pelatihan, pemberian motivasi, dan pendisiplinan karyawan. Peran ketiga dalam pengelompokan antarpersonal adalah peran penghubung. Mintzberg mendeskripsikan aktivitas ini sebagai hubungan dengan individu luar yang memberikan informasi kepada manajer tersebut. Individu luar tersebut mungkin adalah individu atau kelompok di dalam atau di luar organisasi. Manajer penjualan yang mendapatkan informasi dari manajer pengendalian kualitas di perusahaannya sendiri mempunyai kerja sama hubungan internal. Ketika manajer penjualan tersebut berhubungan dengan eksekutif penjualan lain melalui sebuah asosiasi perdagangan pemasaran, ia mempunyai suatu kerja sama hubungan eksternal.

2. Peran Informasional

Semua manajer, sampai pada tingkat tertentu, mengumpulkan informasi dari organisasi-organisasi dan institusi luar. Biasanya, mereka

mendapatkan informasi dengan membaca majalah dan berkomunikasi dengan individu lain untuk mempelajari perubahan selera masyarakat, apa yang mungkin direncanakan oleh para pesaing, dan sebagainya. Mintzberg menyebut hal ini sebagai peran pemantau. Para manajer juga bertindak sebagai penyalur untuk meneruskan informasi ini kepada anggota organisasional. Hal ini disebut sebagai peran penyebar. Selain itu, manajer bertindak selaku juru bicara ketika mereka mewakili organisasi di hadapan pihak luar.

3. Peran Pengambilan Keputusan

Mintzberg mengidentifikasi empat peran terkait pengambilan keputusan. Dalam peran kewirausahaan, para manajer memulai dan mengawasi proyek-proyek baru yang akan meningkatkan kerja organisasi mereka. Sebagai penyelesaian masalah, manajer melakukan tindakan korektif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang tidak terduga. Sebagai pengalokasi sumber daya, manajer bertanggung jawab menyediakan sumber daya manusia, fisik, dan moneter. Terakhir, manajer memainkan peran negosiator, dimana mereka mendiskusikan berbagai persoalan dan tawar-menawar dengan unit-unit lain demi keuntungan unit mereka sendiri.

Peran pemerintah menurut Ndraha (1987) mengatakan bahwa sesungguhnya peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat luas, mulai dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal-hal yang bersifat ideologi dan spritual.

Sehingga untuk menjalankan fungsi dan peran pemerintah yang baik, maka diperlukan peran pemerintahan sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah dalam membuat regulasi

Peran pemerintah dalam membuat regulasi merupakan salah satu faktor terpenting seperti UU Kepariwisata, dan Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perlindungan wisatawan terutama bagi biro perjalanan wisata, peraturan-peraturan tentang retribusi serta peraturan-peraturan lainnya. Dengan adanya regulasi atau undang-undang ini maka tentunya semua kegiatan yang berhubungan dengan kepariwisataan akan berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

2. Peran pemerintah menyediakan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan elemen yang sangat penting atau sebagai faktor pendukung untuk menarik perhatian wisatawan seperti menyediakan meja, kursi, rumah peristirahatan, menyediakan toilet, memasang lampu dan lain-lainnya. Sarana adalah pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah.

3. Peran pemerintah membuat perencanaan

Untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang berhasil maka terlebih dahulu perlu peran pemerintah membuat suatu rencana yang lebih matang dulu, hal ini sangat penting agar pekerjaan tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan. Pekerjaan kalau tidak melalui suatu rencana terlebih dahulu maka pekerjaan tersebut tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan.

4. Peran pemerintah melakukan pengawasan

Pengawasan merupakan hal terpenting untuk menghubungkan target dengan realisasi setiap program kegiatan proyek yang harus dilaksanakan

oleh pemerintah. Suatu pekerjaan ingin berjalan secara efisien dan efektif perlu mengadakan pengawasan, kalau tidak maka pekerjaan tersebut pasti tidak akan berkualitas serta pekerjaan itu tentu juga tidak akan selesai pada waktunya.

2.1.2. Pengertian Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Dalam arti luas pariwisata adalah kegiatan rekreasi diluar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktifitas, pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan data masyarakat maju dan sebagian kecil masyarakat negara berkembang. Pariwisata semakin berkembang sejalan perubahan-perubahan sosial, budaya, ekonomi, teknologidan politik. Runtuhnya sistem kelas dan kasta, semakin ratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ditemukan teknologi transportasi. Dan meningkatkan waktu luang yang didorong oleh pengurangan jam kerja telah mempercepat mobilitas manusia antar daerah, negara, dan benua khususnya dalam hal pariwisata

Secara etimologi, pariwisata berasal dari kata sansekerta, pariwisata terdiri dari dua suku kata *paridan wisata*. *pari* berarti banyak atau berkali-kali, berputar putar, lengkap, dan *wisata* berarti perjalanan, berpergian yang dalam hal ini dengan kata “travel” dalam bahasa inggris.

Menurut Yoeti (1991:131) pariwisata diartikan sebagai:Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Menurut Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Menurut *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, Pariwisata ialah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi, turisme.

Ada beberapa defenisi paraiwisata dibawah ini sebagai berikut :

1. **Koen Meyers (2009)**, Pariwisata ialah aktivitas perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur dan tujuan-tujuan lainnya.
2. **Sinaga (2010)**, Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang terencana, yang dilakukan secara individu maupun kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan suatu bentuk kepuasan dan kesenangan semata.

Menurut H. Kodhyat (dalam spillane, 2006 : 11), defenisi yang luas pariwisata adalah perjalan dari satu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkup hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Dalam UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, disebutkan bahwa, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasiitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintahan daerah. Dengan demikian pariwisata meliputi

1. Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata
2. Penggunaan objek dan daya tarik wisata seperti : kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, waduk, penggelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah seperti gunung merapi, danau dan pantai
3. Pengusaha jasa dan sarana pariwisata yaitu usaha jasa pariwisata, biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi perjalanan insentif dan pameran, infresariat konsultan pariwisata, informasi pariwisata. Usaha sarana pariwisata yang terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata.

Menurut Kuntowijoyo (dalam wardyanta, 2010 : 49) pariwisata memiliki dua aspek kelembagaan dan aspek substansia, yaitu sebuah aktivitas manusia. Dilihat dari sisi kelembagaannya, pariwisata merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan rekreatifnya. Sebagai sebuah lembaga pariwisata dapat dilihat dari sisi manajemennya, yakni bagaimana perkembangannya, mulai dari direncanakan, dikelola, sampai dipasarkan pada pembeli, yakni wisatawan.

Berdasarkan defenisi pariwisata yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, semata-mata hanya untuk menikmati perjalanan tersebut, bertamasyah atau berekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam.

b. Jenis dan Bentuk Pariwisata

Seorang wisatawan melakukan perjalanan wisata karena didorong oleh berbagai motif yang tercermin dalam berbagai macam jenis pariwisata. Terutama dalam internasional taurism, motif tersebut sangat berfariasi dan mempunyai pengaruh yang menentukan pada daerah tujuan wisatan yang akan dikunjunginya. Perbedaan motif-motif tersebut tercermin dengan adanya berbagai jenis pariwisata dalam buku Spillane (2006 : 29) mengemukakan jenis pariwisata khusus, yaitu :

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan

Bentuk pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi kehendak keingintahuannya, untuk mengendorkan ketegangan syarafnya, untuk mengetahui hikayat rakyat setempat, untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian didaerah luar kota, atau bahkan sebaliknya untuk menikmati liburan.

2. Pariwisata untuk rekreasi

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang mau menghendaki memanfaatkan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya yang ingin menyegerkan keletihan dan kelelahannya. Biasanya, mereka tinggal selama mungkin ditempat-tempat yang dianggapnya benar-benar menjamin tujuan rekreasi tersebut, misalnya di pantai, pegunungan, dipusat-pusat peristirahatan atau pusat kesehatan, dengan tujuan menemukan kenikmatan yang diperlukan.

3. Pariwisata untuk kebudayaan

Jenis ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk belajar dipusat-pusat pengajaran riset, untuk mempelajari adat-istiadat

kelembagaan, dan cara hidup rakyat negara lain, untuk mengunjungi monumen bersejarah, mengingat peradaban masa lalu atau sebaliknya penemuan-penemuan besar masa kini, pusat keagamaan, atau juga ikut serta dalam festival-festival seni musik, teater, tarian rakyat dan lain-lain.

4. Pariwisata untuk olahraga

Jenis ini dibagi menjadi dalam dua kategori:

- a. *Big Sport events* yaitu pariwisata-pariwisata olahraga besar seperti Olympiad games, kejuaraan ski dunia, kejuaraan tinju dunia, dan lain-lain yang menarik perhatian tidak hanya pada olahragawannya sendiri, tetapi juga ribuan penonton atau penggemarnya.
- b. *Sporting Tourism of the Practitioners* yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri, seperti pendakian gunung, olahraga naik kuda, berburu, memancing dan lain-lain. Negara yang memiliki banyak fasilitas atau tempat-tempat olahraga seperti ini tentu dapat menarik sejumlah besar penggemar jenis olahraga pariwisata ini.

5. Pariwisata untuk urusan usaha dagang

Menurut para ahli teori, perjalanan usaha ini adalah bentuk professional travel atau perjalanan karena ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan kepada pelakunya baik pilihan daerah tujuan maupun pilihan waktu perjalanan.

6. Pariwisata untuk berkonfensi

Peranan jenis pariwisata ini semakin lama semakin penting, tanpa menghitung banyaknya konfensi atau konferensi nasional, banyaknya simposium

maupun sidang yang diadakan setiap tahun diberbagai negara pada tahun 1969 telah ditaksir sebanyak 3.500 konferensi internasional.

2.1.3 Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan adalah sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintahan berasal dari bahasa Inggris Government dan Gouvennement dari bahasa Perancis yang keduanya berasal dari bahasa Latin, yaitu Gubernaculum, yang berarti kemudi, tetapi diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Pemerintah atau Pemerintahan dan terkadang juga menjadi Penguasa.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. (C.F. Strong).

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: Republik, Monarki / Kerajaan, Persemakmuran (Commonwealth). Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti: Monarki Konstitusional, Demokrasi, dan Monarki Absolut / Mutlak.

Davey (1998:21) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, antara lain : Pertama, sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi - fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan penyediaan layanan yang beorientasi

pada lingkungan dan masyarakatnya. Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakan peraturan-peraturan. Ketiga, fungsi pembangunan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan, yaitu mewakili masyarakat diluar wilayah mereka. Kelima, fungsi koordinasi, yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Ada beberapa definisi para ahli dibawah ini sebagai berikut :

1. J.S.T Simorangkir : Pemerintahan adalah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pengertian pemerintahan sebagai fungsi daripada pemerintah.
2. Muh. Kusnardi : Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan yang tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif.
3. U. Rosenal: Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.
4. H.A.Brasz : Pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.
5. W.S Sayre : Pemerintahan definisinya sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.
6. R. Mac Iver : Pemerintahan adalah ilmu tentang bagaimana cara manusia-manusia dapat diperintah.

7. Syafie Inu kencana : Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.
8. C.F.Strong: Pemerintahan adalah suatu yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kedalam dan keluar. Dalam hal ini ilmu pemerintahan juga erat kaitannya dengan pemerintahan. Menurut C.F. Strong Ilmu Pemerintahan adalah organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Selanjutnya Strong menyatakan pemerintahan itu mempunyai kekuasaan. Dalam hal ini dapat disimpulkan agar pemerintahan dapat seimbang diperlukannya ilmu yang mampu menunjang kegiatan pemerintahan itu sendiri.
9. Syafie Inu Kencana :Pemerintahan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara melaksanakan pengurusan badan eksekutif, pengaturan badan llegalislatif, kepemimpinan dan juga koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerahnya ataupun rakyat dengan pemerintahnya dalam segala peristiwa & gejala pemerintahan.

2.1.4 Objek Wisata

Objek wisata adalah suatu tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya alam yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik yang diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Pengertian objek dan daya tarik wisata menurut Marpaung (2002:78) adalah suatu bentukan dari aktifitas dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat

wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Objek dan daya tarik wisata sangat erat hubungannya dengan travel motivation dan travel fashion, karena wisatawan ingin mengunjungi serta mendapatkan suatu pengalaman tertentu dalam kunjungannya.

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Seorang wisatawan berkunjung ke suatu tempat/daerah/Negara karena tertarik oleh sesuatu yang menarik dan menyebabkan wisatawan berkunjung ke suatu tempat/daerah/Negara disebut daya tarik dan atraksi wisata (Mappi, 2001 : 30). Dalam Undang-Undang No.9 tahun 1990, obyek dan daya tarik wisata adalah segala yang menjadi sarana perjalanan wisata.

Menurut Mappi (2001 : 30-33) Objek wisata dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu :

1. Objek wisata alam, misalnya : laut, pantai, gunung (berapi), danau, sungai, fauna (langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam dan lain-lain.
2. Objek wisata budaya, misalnya : upacara kelahiran, tari-tari (tradisional), musik (tradisional), pakaian adat, perkawinan adat, upacara turun ke sawah, upacara panen, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, kain tenun (tradisional), tekstil lokal, pertunjukan (tradisional), adat istiadat lokal, museum dan lain-lain.
3. Objek wisata buatan, misalnya : sarana dan fasilitas olahraga, permainan (layangan), hiburan (lawak atau akrobatik, sulap), ketangkasan (naik

kuda), taman rekreasi, taman nasional, pusat-pusat perbelanjaan dan lain-lain

4. Dalam membangun obyek wisata tersebut harus memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, sosial budaya daerah setempat, nilai-nilai agama, adat istiadat, lingkungan hidup, dan obyek wisata itu sendiri. Pembangunan obyek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha maupun Perseorangan dengan melibatkan dan bekerjasama pihak-pihak yang terkait.

Menurut UU No.9 Tahun 1990 disebutkan bahwa obyek dan daya tarik wisata terdiri dari :

1. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna.
2. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan sejarah, wisata agro, wisata tirta, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.
3. Berdasarkan hal tersebut diatas, obyek wisata dapat diklasifikasikan menjadi dua macam wisata yaitu wisata buatan manusia dan wisata alam

Menurut UU RI No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, dinyatakan bahwa obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata baik itu pembangunan obyek dan daya tarik wisata, yang dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola dan membuat obyek-obyek baru sebagai obyek dan daya tarik wisata.

2.1.5 Objek-Objek wisata Andalan di Kabupaten Aceh Tengah

1. Pantan Terong, merupakan salah satu Objek Wisata andalan Gayo, punya nama lain bur Salah Niama sedang dalam proses pengembangan, dari sini

kita bisa melihat kota Takengon yang indah dan danau Laut Tawar dari ketinggian.

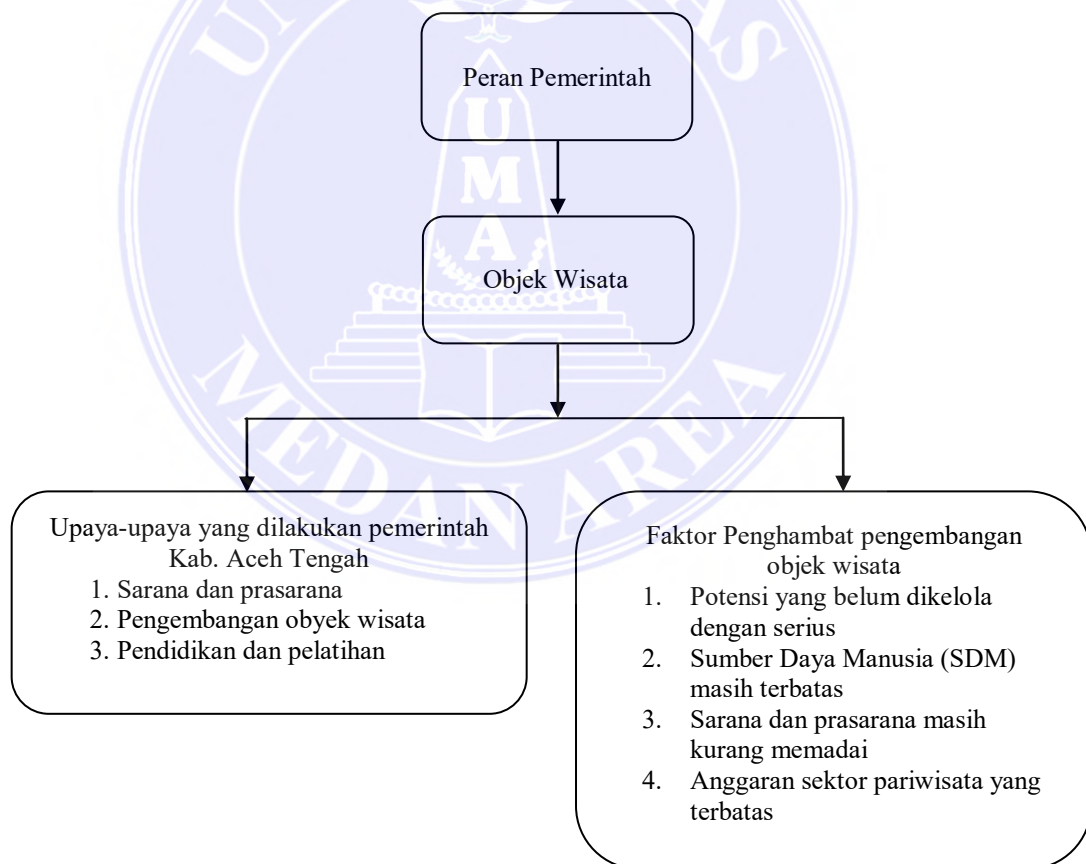
2. Danau Laut Tawar merupakan danau terluas di Takengon, yang memiliki keindahan dan kesejukan, yang membuat danau ini selalu ramai di kunjungi.
3. Air Terjun Megaya, terletak di desa Mengaya Kecamatan Bintang, tidak jauh dari jalan yang mengelilingi danau Lut Tawar.kita akan melalui jalan setapak yang indah pemandangan di kiri kanannya. Kita juga akan melewati jembatan kecil dengan air yang mengalir jernih di bawahnya. ukuran air terjun Mengaya tidak terlalu besar. Namun aliran airnya lumayan deras, segar airnya menjadi obat penghilang rasa penat, dan yang lainnya
4. Goa Loyang Koro.
5. Bur Gayo.
6. Dermaga Lukup Penal.
7. Bur Telege.
8. Bur Lancuk Leweng dan
9. Buntul Rintis kecamatan Bebesen.

2.2 Kerangka Berpikir

Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa Objek Wisata. bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang pembangunan perekonomian nasional. Untuk itulah maka ditempuh salah satu kebijakan, yaitu menggali dan mengembangkan objek-objek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. dengan

mengembangkan potensi obyek wisata, Pengembangan yang dimaksudkan disini yakni suatu proses, cara, perbuatan mengembangkan atau pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus kepada sasaran yang dikehendaki, kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu; perencanaan (planning) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (development) fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (policy) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (regulation).

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dimana (sugiyono, 2014:12) mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna, dalam jenis penelitian ini makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi tetapi lebih menekankan pada makna.

Sedangkan menurut Moleong (2012:11) deskriptif merupakan penelitian dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penggunaan metode ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman dan makna data yang lebih mendalam tentang Peran Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah dalam Pengembangan Objek Wisata guna menunjang Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Kriyantono (2010:57) secara umum, riset yang menggunakan metodologi kualitatif mempunyai ciri-ciri:

1. Intensif, partisipasi periset dalam waktu lama pada *setting* lapangan, periset adalah instrumen pokok riset.
2. Perekaman yang sangat hati-hati terhadap apa yang terjadi dengan catatan-catatan di lapangan dan tipe-tipe lain dari bukti-bukti dokumenter.
3. Analisis data lapangan.

4. Melaporkan hasil termasuk deskripsi detail, *quotes*(kutipan-kutipan) dan komentar-komentar.
5. Periset memproduksi penjelasan unik tentang situasi yang terjadi dari individu-individunya. Lebih pada kedalaman (*depth*) daripada keluasan (*breadth*).

3.1.2 Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang peran pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah Dalam Pengembangan Objek Wisata Guna Menunjang PAD.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah JLN. MESS TIME RUANG KP KEMILI TAKENGON, dengan Unit analisisnya adalah Peran Pemerintahan dalam Pengembangan Objek Wisata. Penentuan lokasi dimaksudkan. Dipilihnya Dinas Pariwisata sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. Kurangnya Mengembangkan Objek Wisata di Pemerintah Kab. Aceh Tengah
2. Dilokasi tersebut memungkinkan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan karena lokasi tersebut mudah dijangkau.

3.1.4 Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Jadwal dan Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Maret 2018				April 2018				Mei 2018				Juni 2018				Juli 2018				Agustus 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan proposal	█																							
2	Seminar Proposal																								
3	Perbaikan Proposal																								
4	Penelitian																								
5	Penyusunan Skripsi																								
6	Seminal Hasil																								
7	Perbaikan Skripsi																								
8	Sidang Meja Hijau																								

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang dirangkum oleh sugiyono sebagai berikut :

1. Kepustakaan

Segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau pun yang diteliti. Informasi dapat diperoleh berbagai sumber seperti buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, skripsi serta peraturan-peraturan

2. Wawancara (interview)

Esterberg (2002) mendefenisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi atau berupa ucapan, pikiran serta gagasan. Dengan wawancara diharapkan informasi tentang penelitian ini dapat terungkap dan terekam oleh peneliti secara cermat serta memperoleh informasi yang ada dengan jawaban yang sejujur-jujurnya. sugiyono (2014 : 316)

3. Observasi

Metode observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. Dimana dilakukan pengamatan atau pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek, maka peneliti terjun kelapangan dan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala nyata pada objek yang diteliti.

4. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Aceh tengah merupakan salah satu objek wisata yang merupakan aset yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu tujuan wisata dalam mengembangkan dan menyemarakkan pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah, Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan potensi Objek Wisata di Kabupaten Aceh Tengah dengan upaya penyediaan sarana dan prasarana seperti pembuatan tempat bersantai, rumah pondok, wc umum, Mushola dan Tempat parkir belum dikelola Secara baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah, Sesuai dengan Kebijakan berkaitan dengan keseriusan Pemerintah Memanfaatkan dana bantuan masyarakat investor. Pengembangan destinasi pariwisata oleh Dinas Pariwisata telah berjalan sesuai dengan Kebijakan yang ada, namun dalam pelaksanaan itu terdapat masalah-masalah yang membawa dampak yang negatif dalam pelaksanaan strategi, hal yang ini paling bermasalah adalah penganggaran yang terbatas membuat program-program besar tidak terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kendala dalam mengembangkan potensi wisata oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah sangat beragam, dengan kendalanya yaitu potensi yang belum dikelola secara serius, pengembangan pariwisata yang masih kurang, sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang kepariwisataan masih terbatas, sarana dan prasarana pendukung di objek-objek wisata yang belum memadai, serta terbatasnya anggaran sektor pariwisata.

5.2 SARAN

Dari hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis merasa perlu memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat buat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan berbagai pihak. Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat dan Daerah juga harus memperhatikan pentingnya sektor pariwisata bagi daerah, yaitu dengan memberikan bantuan anggaran lebih untuk sektor pariwisata sehingga sektor pariwisata di daerah dapat berkembang dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga perlu memperhatikan anggaran tetap setiap periode untuk setiap wisata yang ada di Kabupaten Aceh Tengah yang sangat berpotensi.
3. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga perlu memperhatikan kurangnya penyajian sarana informasi pariwisata bagi wisatawan di Kabupaten Aceh Tengah terkait wilayah dan objek apa saja yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.
4. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga perlu memperbaiki dan menambahkan fasilitas penunjang sarana dan prasarana untuk kenyamanan pengunjung dan wisatawan lokal dan mancanegara yang datang di objek wisata di Kabupaten Aceh Tengah seperti perbaikan akses jalan menuju lokasi Wisata, membuat fasilitas Mandi Cuci Kaskus (MCK), tempat Ibadah, tempat pos retribusi dan papan informasi wisata.

5. Masyarakat sekitar hendaknya lebih berperan aktif di sekitar Objek Wisata, dan masyarakat yang berkunjung di objek wisata diharapkan dapat menjaga keamanan, kenyamanan, dan kebersihan objek wisata yang dikunjunginya



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Syamsidar, *Departemen pendidikan dan kebudayaan Pariwisata*, Yogyakarta, 1999.

Wahab, S. “*Manajemen Kepariwisata*” . Penerbit PT. Pradnya Paramita. Jakarta

Oka A. Yoeti, *Penantar Ilmu Pariwisata*, Aksara, Bandung 1983.

Soerjono Soekanto. 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru : Rajawali Pers. Jakarta

Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Pers. Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.

Simatupang, Violetta. 2009. *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia* Bandung: PT Alumn Muljadi A. J. 2009.

Kepariwisata dan Perjalanan. Jakarta: Raja Grafindo

Pujileksono Sugeng. 2016. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Intrans Publishing. Malang. 2016.

Riswandi, 2009. *Ilmu Komunikasi (cetakan Pertama)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung.

ALVABET. 5 Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Syamsi, Ibnu. 1994. *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.

Wagito, “*Kebijakan Pembangunan Pariwisata Nasional Indonesia*,” dalam: Fandeli, Chafid (Ed) 2001. *Dasar-dasar Manajemen*

Kepariwisata Alam. Yogyakarta: Liberty

Wahab, Salah. 2003. *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita

Skripsi

MINDAHAYATI N. 2011. “PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PARIWISATA DI KAWASAN DANAU TOBA DI KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA

JURNAL :

Febrianti Dwi Cahya Nurhadi, Mardiyono, Stefanus Pani Rengu, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume 2 nomor 2. Januari 2013, yang berjudul Strategi Pembangunan Pariwisata Oleh Pemerintahan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Mojokerto.

Internet :

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata>

*lintasgayo.com/2017/09/12/meningkatkan-pada-kabupaten-Aceh-tengah-melalui-
pariwisatalintasgayo.com/2017/08/10/program-lets-go-mnc-tv-sasar-potensi-wisata-
gayo lintasgayo.com/tag/wisata-gayo
aceh.tribunnews.com › Nanggroe › Aceh Tengah*



LAMPIRAN 1

DATA-DATA INFORMAN

1. Nama : Munawar Khalil, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
Tanggal Penelitian : 28 Mei 2018
Tempat Penelitian : Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2. Nama : Sarwani, M.BA
Jabatan : Sekretaris Dinas Pariwisata
Tanggal Penelitian : 30 Mei 2018
Tempat Penelitian : Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3. Nama : Maswani, SE, M.Si
Jabatan : Ketua bidang pengembangan usaha Pariwisata
Tanggal Penelitian : 30 Mei 2018
Tempat Penelitian : Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
4. Nama : Mariani
Jabatan : Masyarakat
Tanggal Penelitian : 4 juni 2018
Tempat Penelitian : Desa Dedalu, Kecamatan Lut Tawar
5. Nama : Mulyadi
Jabatan : Masyarakat
Tanggal Penelitian : 5 juni 2018
Tempat Penelitian : Desa Toweren Antara, Kecamatan Lut Tawar

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1

Foto bersama ibu Sarwani, M.BA selaku Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah



Gambar 2

Foto bersama dengan Bapak Munawar Khalil, SE, MM selaku Kepala Bidang Destinasi Pariwisata



Gambar 3

Foto Ibu Maswani, SE, M.Si selaku Ketua Bidang Pengembangan Usaha pariwisata





